



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU TENTANG KEPARIWISATAAN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**KE POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**  
**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023—2024**  
**TANGGAL 28 S.D. 30 JUNI 2024**

---

Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dengan anggota perwakilan dari masing-masing fraksi. Kunjungan kerja diterima oleh Direktur Poltekpar Medan, Dr. Ngatemin, M.Si., Kabid Destinasi Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Medan, para pelaku pariwisata Kota Medan, seperti HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), dan lain-lain, termasuk KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kota Medan.

Beberapa pelaku pariwisata menyampaikan beberapa poin, antara lain terkait perlunya Ripparnas (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) disusun secara *bottom-up* dari daerah, adanya perbaikan regulasi terkait sertifikasi bagi sumber daya pariwisata, perlunya keberpihakan kepada pramuwisata, pentingnya kurikulum sekolah yang memperkenalkan pariwisata sejak dini, dan poin penting lain. Pramuwisata, meminta adanya perlindungan yang pasti bagi mereka dalam RUU tentang Kepariwisata dan perlunya aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, yang benar-benar mendukung kepentingan mereka. Masukan lainnya adalah terkait bidang usaha pariwisata yang juga diatur oleh UU Cipta Kerja, sehingga perlu diselaraskan. Diusulkan pula, agar *online travel agency*, diatur izinnya dalam RUU tentang Kepariwisata maupun dalam aturan turunannya.

Sedangkan Poltekpar Medan, menyampaikan usulan, di antaranya terkait penyediaan anggaran bagi riset bidang pariwisata di masing-masing tingkat (level) pemerintahan. Riset pariwisata membutuhkan biaya besar, dan rata-rata pemerintah daerah tidak menganggarkan dana. Riset yang umumnya dilakukan oleh tingkat pusat, tidak menjamin hasil yang sesuai dengan kondisi pariwisata di daerah.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi usulan-usulan tersebut dan akan menjadikan rujukan bagi penyempurnaan RUU tentang Kepariwisata.

**Kota Medan, 29 Juni 2024**

Tim Kunker Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Poltekpar Medan.